

## Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015



## Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) B PK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015. LAK ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI. LAK Tahun 2015 ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2015.

Skor kinerja atas 17 target IKU BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang telah ditetapkan dalam dokumen PKPK tahun 2015 adalah 93,05, dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.574.796.909,00 atau sebesar 98,24% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp25.015.521.000,00. Pencapaian skor kinerja Tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2014 sebesar 84,52.

Tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang bebas, mandiri, dan profesional. Di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan terus meningkatkan peran nya dan menjadi pelopor keteladanan (leading by example) dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Februari 2016 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh,

Maman Abdulrachman NIP 195903191980031003

# Daftar Isi

### Kata Pengantar

D/	FTA	R ISI	i
D/	FTA	R TABEL	ii
DA	FTA	R GAMBAR	iv
DA	FTA	R GRAFIK	٧
1.	Pen	dahuluan	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Tugas dan Fungsi	1
	C.	Struktur Organisasi	8
	D.	Sumber Daya Manusia dan Anggaran	8
2.	Per	encanaan Strategis dan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK)	9
	A.	Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Aceh	9
	В.	Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2015	15
3.	Aku	ıntabilitas Kinerja (Evaluasi atas Pencapaian Kinerja)	17
	SS.	1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	18
	SS.	2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	22
	SS.	3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	28
	SS.	4 Meningkatan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Kerugian Negara/Daerah	29
	SS.	5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan	32
	SS.	6 Meningkatkan Komunikasi dengan <i>Stakeholders</i>	34
	SS.	7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan	36
	SS.	8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	38
	SS.	9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	39
4.	Pen	utup	41

#### LAMPIRAN

# **Daftar Tabel**

Tabel	1 – Indikator Kinerja Utama	13
Tabel	2 – Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan IKU	14
Tabel	3 – Tabel Target Pencapaian Kinerja Sesuai dengan PKPK Tahun 2015 (setelah revisi RKP)	16
Tabel	4 – Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015	17
Tabel	5 – Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013	19
Tabel	6 – Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun	
	2011-2015	19
Tabel	7 – Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013	21
Tabel	8 – Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun	
	2011-2015	22
Tabel	9 – Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013	23
Tabel	10 – Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun	
	2011-2015	24
Tabel	11 – Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013	24
Tabel	12 – Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun	
	2011-2015	24
Tabel	13 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013	25
Tabel	14 – Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun	
	2011-2015	25
Tabel	15 – Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2015, 2014, dan 2013	26
Tabel	16 – Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun	
	2011-2015	26
Tabel	17 – Perbandingan Capaian IKU 2.5 Tahun 2015, 2014, dan 2013	27
Tabel	18 – Perbandingan Realisasi IKU 2.5 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun	
	2011-2015	27
Tabel	19 – Perbandingan Capaian IKU 2.6 Tahun 2015, 2014, dan 2013	28

Tabel	20 – Perbandingan Realisasi IKU 2.6 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	21 – Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	22 – Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	23 – Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	24 – Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	25 – Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	26 – Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	27 – Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	28 – Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	29 – Perbandingan Capaian IKU 5.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	30 – Perbandingan Realisasi IKU 5.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	31 – Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	32 – Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	33 – Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Tabel	34 – Perbandingan Capaian IKU 7.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	35 – Perbandingan Realisasi IKU 7.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	36 – Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	37 – Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015
Tabel	38 – Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013
Tabel	39 – Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun
	2011-2015

## **Daftar Gambar**

Gambar	1 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh	2
Gambar	2 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh	8
Gambar	3 – Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015	10
Gambar	4 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Aceh	11
Gambar	5 – Peta Strategis Auditorat Utama Keuangan Negara V	12
Gambar	6 – PKPK BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015	15
Gambar	7 – Pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2015	19
Gambar	8 – Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tipikor, Banda Aceh	21
Gambar	9 – Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Aceh TA 2014	22
Gambar	10 – Pemeriksaan Fisik Jalan di Kabupaten Bener Meriah	25
Gambar	11 – Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh	32
Gambar	12 – BPK Goes To School di SMA Labschool Unsyiah, Banda Aceh	35
Gambar	13 - Konferensi Pers atas Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Aceh TA 2014	35

# **Daftar Grafik**

Grafik 1 – Profil Sumber Daya Manusia	8
Grafik 2 – Jumlah LHP PKN yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Periode 2011-2015	21
Grafik 3 – Jumlah LHP yang Diterbitkan Periode 2011-2015	23
Grafik 4 – Tingkat Pemanfaatan Anggaran (2011-2015)	40

## 1. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, diperlukan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini mensyaratkan seluruh instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan kinerjanya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Aceh merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK yang berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2015 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

### **B.Tugas dan Fungsi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang

tersebut, BPK RI membentuk kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Aceh.



Gambar 1 - Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 403 menjelaskan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas:

"Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN."

## Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

- Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. Memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
   BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan internal pada entitas pemeriksa;
- Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
   Perwakilan Provinsi Aceh;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;

- Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 405 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari:

#### 1. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas :

- Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemuktahiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- Sub Bagian Sumber Daya Manusia
   Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan
   Provinsi Aceh.
- Sub Bagian Keuangan
   Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK
- Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi
   Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum,
   pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan
   prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Perwakilan Provinsi Aceh.

#### Sub Bagian Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

#### 2. Subauditorat Aceh I

- a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
  - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  - Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  - 11) Melakukan pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabililtas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

#### 3. Subauditorat Aceh II:

- a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
  - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  - Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  - 11) Melakukan pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabililtas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

#### 4. Sub Auditorat Aceh III

- a. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  - 1) Merumuskan rencana kegiatan;

- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) Melakukan pemuktahiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabililtas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

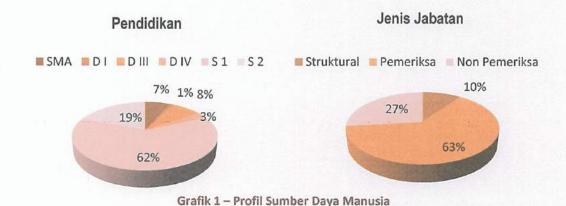
### C. Struktur Organisasi



Gambar 2 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh

### D.Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh berjumlah 104 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 5 orang Kepala Sub Bagian dan 94 orang staf. Berikut profil SDM di BPK Perwakilan Provinsi Aceh sampai dengan Desember 2015:



Pagu Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp25.015.521.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.574.796.909,00 atau 98,24% dari total anggaran.

# 2. Perencanaan Strategis dan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK)

# A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 ditetapkan melalui keputusan BPK RI No. 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan BPK RI No. 3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mengembangkan Renstra 2011-2015 dengan memfokuskan pada peningkatan hubungan dengan para pemangku kepentingan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, penyempurnaan proses bisnis utama melalui pelaksaanaan pemeriksaan yang terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas, kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM melalui perwujudan BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai organisasi yang efisien dan efektif.

## Framework Renstra

#### **BPK Perwakilan Provinsi Aceh**

#### Visi

Menjadi BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

#### Misi

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas di wilayah BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Di samping itu, renstra 2011-2015 menjadikan BPK Sinergi sebagai tema utama. BPK Sinergi mencakup sinergi dengan pihak eksternal dan pihak internal.

Tujuan Strategis	Sasaran Startegis
Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara pada entitas di wilayah BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan	• Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan     Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat     Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK Perwakilan Provinsi Aceh	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM     Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders     Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan     Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan     Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Nilai Dasar

Independensi I	Integritas	IProfesionalisme	
maependens	micegina	Trosesionarisme	
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		NAME OF TAXABLE PARTY.

Gambar 3 - Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015

Independensi					
Independenci	-	- 9	Complete Re	 - 11	
	E 70				. 1

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

## Integritas

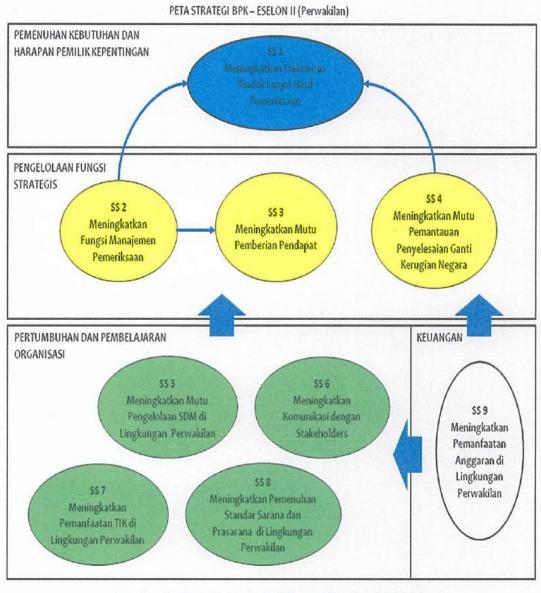
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

#### **Profesionalisme**

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

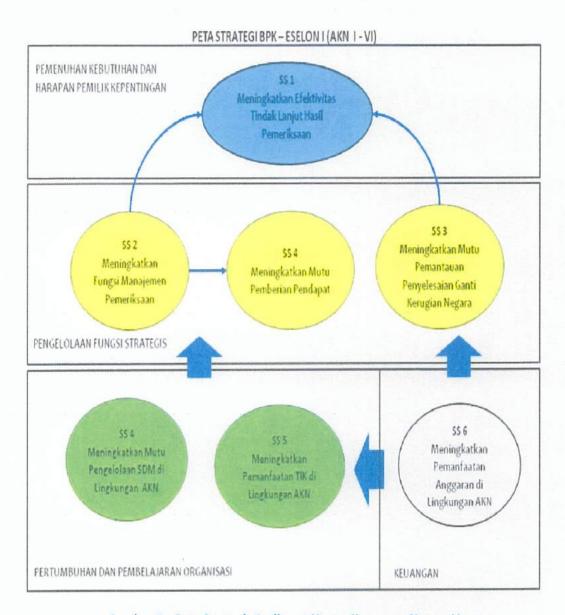
### **Peta Strategis**

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja untuk tahun 2015 dapat digambarkan dalam Peta berikut ini:



Gambar 4 - Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Aceh tersebut digunakan dalam rangka mendukung peta strategis Auditorat Utama Keuangan Negara V sebagaimana tergambar pada gambar berikut:



Gambar 5 – Peta Strategis Auditorat Utama Keuangan Negara V

## Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur pencapaian Renstra 2011-2015, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	SS1
1.2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian Negara	SS1
2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	SS2
2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	SS2
2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	SS2
2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	SS2
2.5	Pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan	SS2
2.6	Persentase pemeriksaan yang memanfaatkan Portal e-Audit	SS2
3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP	SS3
4.1	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diterbitkan	SS4
4.2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SS4
5.1	Jam pelatihan per pegawai	SS5
5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	SS5
6.1	Jumlah Media Relation per tahun	SS6
7.1	Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal	SS7
8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	SS8
9.1	Tingkat pemanfaatan anggaran	SS9

Tabel 1 - Indikator Kinerja Utama

#### Keterangan:

Indikator Dampak Indikator Hasil

Indikator Proses Indikator Input

## Matrik Hubungan Tujuan Strategis, sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara pada entitas di wilayah BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti     Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan  Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat  Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	<ol> <li>Jumlah LHP yang diterbitkan</li> <li>Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan</li> <li>Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan</li> <li>Ketepatan waktu penyelesaian LHP</li> <li>Pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan</li> <li>Persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-Audit</li> <li>Jumlah Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan Direktorat EPP</li> <li>Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang diterbitkan</li> <li>Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah</li> </ol>
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK Perwakilan Provinsi Aceh.	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan  Meningkatkan komunikasi dengan stakeholders  Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan  Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana  Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	Jam Pelatihan per Pegawai     Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatiahan  Jumlah media relation per tahun  Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal  Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar  Tingkat pemanfaatan anggaran

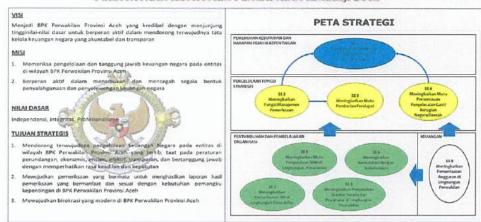
Tabel 2 - Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan IKU

## Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2015

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan sampai dengan di tingkat eselon II. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015 yang tertuang dalam PKPK 2015.

#### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH

#### PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERIA 2015



#### INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil	1.1	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	65%
	Pemeriksaan	1.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara	65%
2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1	Jumlah LHP yang Diterbitikan	55
		2.2	Jumlah LHP Kinerja yang Diterbibian	5
		2.3	Kotepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100%
		2.4	Ketepatan Waldu Penyelesalan LHP	100%
		2.5	Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan	100%
		2.6	Persentase Pomeriksaan yang Memanfaatkan Portal &-Audit	89%
3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3,1	Jumlah Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan Direktorat EPP	1
4	Meningkatkan Hutu Pemantauan Penyelesalah Ganti Kerugian Negara / Duerah	4.1	Jumfah Laporan Pernantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah yang Diterbitkan	48
		4.2	Ketepatan Waktu Penyampaian Lappran Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara / Daerah	100%
5	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Penwakilan	5.1	Jam Pelatihan per Pegawai	40
		5.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	90%
6	Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders	6.1	Jumlah Alesla Relation per tahun	3
7.	Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwaklan	7.1	Aptikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal	100%
8	Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesual dengan Standar	90%
9	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwaklan	9,1	Tingkat Pemanfastan Anggaran	90%
	Jumlah	17		

JUMLAH ANGGARAN: Rp 24.930.521.000,00

JUMLAH ANGGARAN : Rp 24.930.521.000,00

Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerjasama Luar Negeri
Kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia
Kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungajawaban Keuangan Negara
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum

Rp Rp Rp 1.304.392.000,00 7.095.696.000,00 555.860.000,00 3.776.195.000,00

JAKARTA, 15 DESEMBER 2014

TORTAMA KN V - Au-BAMBANG PAMLINGKAS

affind of

KEPALA PERWAKILAN

Gambar 6- PKPK BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015

12.198.378.000.00

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Aceh selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 15 Desember 2014.

Namun demikian, pada semester II tahun 2015 terdapat revisi atas Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) yang mempengaruhi IKU 2.1 (Jumlah LHP yang Diterbitkan) dan IKU 2.2 (Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan). Oleh karena itu, rincian Sasaran Strategis (SS) dan target IKU 2015 (setelah revisi RKP) adalah sebagai berikut:

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target 2015
1.	Meningkatkan Efektivitas Tindak	1.1	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	65%
	Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian Negara	65%
2.	Meningkatkan Fungsi Manajemen	2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	57
	Pemeriksaan	2.2	Jumlah LHP kinerja yang diterbitkan	7
		2.3	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100%
		2.4	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP	100%
		2.5	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> Dalam Pemeriksaan	100%
		2.6	Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan portal e-Audit	89%
3.	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3.1	Jumlah Usulan Pendapat yang dimanfaatkan Direktorat EPP	1
4.	Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian	4.1	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang diterbitkan	48
	Negara/Daerah	4.2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	100%
5.	Meningkatkan Mutu Pengelolaan	5.1	Jam Pelatihan Rata-rata Pegawai	40 jam
	SDM di Lingkungan Perwakilan	5.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	90%
6.	Meningkatkan Komunikasi Dengan Skateholders	6.1	Jumlah Media Relation per Tahun	3
7.	Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan	7.1	Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal	100%
8.	Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	90%
9.	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	9.1	Tingkat Pemenuhan Anggaran	90%

Tabel 3 – Tabel Target Pencapaian Kinerja Sesuai PKPK Tahun 2015 (Setelah Revisi RKP)

## 3. Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi atas Pencapaian Kinerja)

### Capaian Kinerja Organisasi

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015 semula 94,05. Akan tetapi, berdasarkan hasil validasi semester II Tahun 2015, terdapat pengurangan 1 (satu) skor dikarenakan kesalahan penginputan atas kegiatan diklat, sehingga skor akhir kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015 adalah 93,05. Namun demikian, skor kinerja tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan skor Tahun 2014 sebesar 84,52. Peningkatan skor kinerja ini terutama disebabkan karena sebanyak 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai atau melebihi target yang ditentukan, dan sebanyak 3 (tiga) IKU capaiannya berkisar antara 50%-66%. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	65%	50,44%	77,60
1.2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian Negara	65%	80%	105
2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	57	57	100
2.2	Jumlah LHP kinerja yang diterbitkan	7	7	100
2.3	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	100%	100
2.4	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP	100%	100%	100
2.5	Pemenuhan Quality Assurance dalam pemeriksaan	100%	100%	100
2.6	Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit	89%	66,67%	74,91
3.1	Jumlah Usulan Pendapat yang dimanfaatkan Direktorat EPP	1	1	100
4.1	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang diterbitkan	48	48	100
4.2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	100%	100%	100
5.1	Jam Pelatihan Rata-rata Pegawai	40 Jam	51,56 Jam	105
5.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	90%	51,52%	57,24
6.1	Jumlah Media Relation per Tahun	3	17,60	105
7.1	Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal	100%	100%	100
8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	90%	94,31%	104,79
9.1	Tingkat Pemanfaatan Anggaran	90%	98,24%	105

Tabel 4 – Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2015

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

#### SS 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mendorong BPK agar mampu memberikan rekomendasi yang bermutu sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Pencapaian SS 1 dipantau melalui dua indikator IKU, yaitu: (1) Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan (2) Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara. Secara keseluruhan, skor SS 1 pada tahun 2015 adalah sebesar 85,55.

#### IKU 1.1 - Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Aceh secara berkala telah melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah Aceh.



Gambar 7 - Pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2015

Realisasi perkembangan capaian IKU 1.1 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun			
	2015	2015	2015	2014	2013	
1.1 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	65%	50,44%	77,60%	54,27%	66,90%	

Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 54,27%. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumya, peningkatan capaian tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari jajaran BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan setiap semester selama kurun waktu tahun 2015 dengan Pemerintah Daerah di wilayah Aceh.

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 – Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

1921	Target Tahun		nun		Realisasi	Persentase Realisasi 2015	
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	dibanding Target 2015
1.1 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	60%	60%	60%	65%	65%	50,44%	77,60%

Tabel 5 menunjukkan bahwa capaian IKU 1.1 terhadap target tahun 2015 sebesar 77,60%. Meskipun capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh atas IKU 1.1 belum memenuhi target PKPK Tahun 2015, tetapi terdapat peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Tidak tercapainya target IKU 1.1. Tahun 2015 disebabkan karena sebagian besar rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di wilayah Aceh adalah dalam status II (dalam proses).

Kondisi ini semakin mendorong BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk melakukan pembahasan tindak lanjut yang lebih intens dan efektif. Selain itu, kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan entitas guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan.

# IKU 1.2 – Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Kedua mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK terletak pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penghitungan jumlah kerugian negara.

Sepanjang tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Aceh belum pernah melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang. Akan tetapi, terdapat dua Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang disampaikan kepada kepada instansi yang berwenang.



Gambar 8 - Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tipikor, Banda Aceh

Selama periode 2011-2015 LHP PKN yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2 – Jumlah LHP PKN yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Periode 2011-2015

Realisasi perkembangan capaian IKU 1.2 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 - Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun			
	2015	2015	2015	2014	2013	
1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara	65%	80%	105%	105%	100%	

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 – Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Та	rget Tah		Pealisasi	Persentase Realisasi	
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Realisasi Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara	N/A	N/A	N/A	60%	65%	80%	105%

#### SS 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



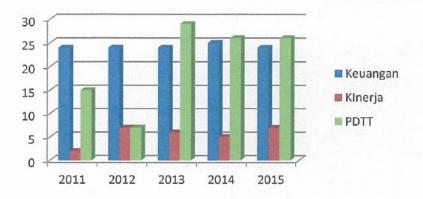
Gambar 9 - Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Aceh TA 2014

Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan dengan melaksanakan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif, serta dengan memanfaatkan biaya pemeriksaan yang optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, skor SS 2 pada tahun 2015 adalah sebesar 97,74.

#### IKU 2.1 - Jumlah LHP yang Diterbitkan

IKU 2.1 merupakan jumlah seluruh LHP yang diterbitkan oleh Perwakilan meliputi LHP keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu pada periode tertentu. Bertujuan untuk meningkatkan kuantitas hasil pemeriksaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Grafik perkembangan IKU 2.1 selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 3 - Jumlah LHP yang Diterbitkan periode 2011-2015

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa terdapat penurunan Jumlah LHP untuk LHP jenis pemeriksaan PDTT. Namun demikian, capaian IKU ini menunjukkan terpenuhinya target IKU 2.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun			
		2015	2015	2014	2013	
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan	57	57	100%	100%	100%	

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 – Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

	Target Tahun					Realisasi	Persentase Realisasi
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan	41	38	59	56	57	57	100%

#### IKU 2.2 - Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan

Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomis, efiensi, dan efektivitas. Bertujuan untuk meningkatkan peran serta perwakilan dalam mewujudkan good governance melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Melalui pemeriksaan kinerja dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah daerah di wilayah Aceh.

Tahun 2015, realisasi IKU 2.2 BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah sebanyak 7 LHP dan telah sesuai target. Berikut adalah capaian IKU 2.2 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 11 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun		
	2015	2015	2015	2014	2013
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan	7	7	100%	100%	100%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 dan target 2015 dalam RIR BPK Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 – Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Та	Realisasi	Persentase Realisasi			
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan	2	7	6	5	7	7	100%

#### IKU 2.3- Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

IKU 2.3 merupakan pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan waktu penugasan yang telah ditetapkan dalam surat tugas/program pemeriksaan. Pengukuran IKU ini dilakukan atas seluruh jenis pelaksanaan pemeriksaan (keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu), pada periode tertentu. Bertujuan untuk mendorong terwujudnya pemeriksaan yang tepat waktu.



Gambar 10 - Pemeriksaan Fisik Jalan di Kabupaten Bener Meriah

Perbandingan capaian IKU 2.3 tahun 2015 dengan capaian tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU -	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun		
	2015	2015	2015	2014	2013
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 – Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Та	rget Tah	Realisasi	Persentase Realisasi		
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### IKU 2.4- Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP

Merupakan pelaporan atas hasil pemeriksaan yang diterbitkan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Pemeriksaan (P2). Pengukuran IKU ini dilakukan atas seluruh jenis pelaksanaan pemeriksaan (keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu), pada periode tertentu. Bertujuan agar pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan tepat waktu.

Perbandingan capaian IKU 2.4 tahun 2015 dengan capaian tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun		
	2015	2015	2015	2014	2013
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP	100%	100%	100%	69,55%	105%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 – Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

			Tai	rget Tah		Realisasi	Persentase Realisasi		
IKU		2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015	
2.4 Penye	Ketepatan elesaian LHP	Waktu	50%	70%	80%	95%	100%	100%	100%

#### IKU 2.5- Pemenuhan Quality Assurance Dalam Pemeriksaan

Quality Assurance dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu (quality control) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan Quality Assurance dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menargetkan tingkat pemenuhan *quality* assurance sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Berikut adalah capaian IKU 2.5 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 17 - Perbandingan Capaian IKU 2.5 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun			
		2015	2015	2014	2013	
2.5 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> Dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	95,86%	

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 – Perbandingan Realisasi IKU 2.5 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

			Та	rget Tah	Paplicaci	Persentase Realisasi		
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Realisasi Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015	
2.5 Assur	Pemenuhan <i>Quality</i> rance Dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### IKU 2.6- Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit

IKU ini mengukur sejauh mana para pemeriksa BPK RI memanfaatkan portal e-Audit dalam mendukung tugas pemeriksaan. IKU 2.6 bertujuan untuk menjamin mutu pemeriksaan BPK RI sehingga dapat mewujudkan visi BPK RI agar menjadi lembaga pemeriksaan keuangan negara yang kredibel. Pengukuran kinerja dengan memanfaatkan portal e-Audit baru diimplementasikan pada tahun 2014.

Persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-Audit untuk tahun 2015 adalah sebesar 66,67% dengan skor senilai 74,91%. Untuk tahun 2015, IKU 2.6 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 89%. Tidak tercapainya target pada tahun 2015 disebabkan sebagian besar jenis pemeriksaan yang dilakukan pada Triwulan IV adalah pemeriksaan kinerja. Oleh karena itu, data yang ada di e-Audit tidak berkaitan langsung dengan pemeriksaan.

Namun demikian, untuk tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan e-Audit dalam setiap jenis pemeriksaan. Berikut adalah capaian IKU 2.6 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 19 - Perbandingan Capaian IKU 2.6 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun		
		2015	2015	2014	2013
2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit	89%	66,67%	74,91%	75%	N/A

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 – Perbandingan Realisasi IKU 2.6 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Tar	get Tah	un		Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
IKU	2011	2012	2013	2014	2015		
2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e- Audit	N/A	N/A	N/A	80%	89%	66,67%	74,91%

#### SS 3 – Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat

Pemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Dalam implementasinya, kewenangan ini dituangkan dalam Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat. Sasaran strategis ini diukur dengan satu IKU yaitu Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Direktorat Evaluasi Pelaporan dan Pemeriksaan (Dit EPP). Secara keseluruhan, skor SS 3 pada tahun 2015 adalah sebesar 100.

#### IKU 3.1- Jumah Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan oleh Dit EPP

Pendapat merupakan suatu pandangan, buah pikiran, kesimpulan atau opini atas suatu tema yang diberikan oleh suatu pihak. Pemberian pendapat pada umumnya disertai

dengan alasan dan memiliki latar belakang pertimbangan. Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit EPP untuk tahun 2015 adalah sejumlah satu usulan dengan skor kinerja senilai 100. Nilai IKU 3.1 ini telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Hal tersebut dikarenakan pada November 2015, BPK Perwakilan Provinsi Aceh telah menyampaikan Usulan Pendapat ke Dit EPP dengan judul: "Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Memformulasikan Aturan yang Memberikan Kontribusi kepada Daerah Tanpa Memberatkan Industri Telekomunikasi." Usulan pendapat ini juga telah dikaji oleh Dit EPP dan dapat diterima sebagai database konsep Pendapat BPK. Realisasi perkembangan capaian IKU 3.1 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun			
	2015	2015	2015	2014	2013	
3.1 Jumlah Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan oleh Dit EPP	1	1	100%	100%	100%	

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 – Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Tar	get Tah	un		Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi	
IKU	2011	2012	2013	2014	2015		2015 dibanding Target 2015	
3.1 Jumlah Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan oleh Dit EPP	3	1	1	1	1	1	100%	

SS 4 - Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK RI menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK RI ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK RI akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara. Secara keseluruhan, skor SS 4 pada tahun 2015 adalah sebesar 100.

# IKU 4.1- Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang Diterbitkan

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. Bertujuan untuk mendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2015 adalah sejumlah 48 LHP dengan skor senilai 100. Nilai IKU 4.1 ini telah mencapai target yang ditetapkan sejumlah 48 LHP. Berikut adalah capaian IKU 4.1 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 23 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun		
		2015	2015	2014	2013
4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang Diterbitkan	48	48	100%	100%	100%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 – Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Tar	get Tahı		Realisasi	Persentase Realisasi	
IKU	2011 2012	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang Diterbitkan	24	48	48	48	48	48	100%

### IKU 4.2- Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Merupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan Perwakilan ke Direktorat EPP dengan tembusan Ditama Binbangkum. Bertujuan untuk mengukur ketepatan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dengan tepat waktu.

Realisasi IKU 4.2 – Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah untuk tahun 2015 adalah sebesar 100% dengan skor 100. Nilai IKU 4.2 ini sesuai dengan target PKPK tahun 2015 yaitu 100%. Berikut adalah capaian IKU 4.2 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 25 - Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun			
	2015	2015	2015	2014	2013	
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	100%	100%	100%	66,67%	105%	

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 – Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		T	arget Tah	iun		Realisasi	Persentase Realisasi
IKU	2011	2011 2012	2013 2014		2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	70%	75%	75%	75%	100%	100%	100%

#### SS 5 - Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting bagi BPK RI. Oleh karena itu, pengembangan SDM terutama dari aspek kualitas (tingkat kompetensi) perlu terus ditingkatkan.





Gambar 11 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya untuk merencanakan dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Secara keseluruhan, skor SS 5 pada tahun 2015 adalah sebesar 74,91.

#### IKU 5.1- Jam Pelatihan Rata-rata Pegawai

Bertujuan untuk mengetahui rata-rata jam pendidikan dan pelatihan pegawai. Jam pelatihan adalah lamanya waktu kegiatan pelatihan yang diikuti oleh setiap pegawai. Sementara itu, "waktu" adalah berupa jam atau hari (1 hari ekuivalen dengan 10 jam pelajaran). Jam pelatihan melekat pada pegawai, sehingga bagi pegawai yang telah

dimutasi, maka jam pelatihannya pun tidak dihitung sebagai perhitungan IKU di satuan kerja yang lama, tetapi diperhitungkan ke dalam IKU satuan kerja yang baru.

Realisasi IKU 5.1 – Jam pelatihan rata-rata pegawai untuk tahun 2015 adalah sebesar 51,56 Jam dengan skor senilai 105. Nilai IKU 5.1 ini telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 40 Jam. Berikut adalah capaian IKU 5.1 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 27 - Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capaian IKU Tahun			
	2015	2015	2015	2014	2013	
5.1 Jam Pelatihan Rata-rata Pegawai	40 Jam	51,56 Jam	105%	105%	105%	

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 – Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU		Та	rget Tal	nun		Realisasi Tahun	Persentase Realisasi	
IKO	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015 dibanding Target 2015	
5.1 Jam Pelatihan Rata- rata Pegawai	40 Jam	40 Jam	40 Jam	40 Jam	40 Jam	51,56 Jam	105%	

#### IKU 5.2- Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan

Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa per tahunnya adalah 40 jam. IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.

Untuk tahun 2015, realisasi IKU 5.2 adalah sebesar 51,52% dengan skor senilai 57,24. Nilai IKU 5.2 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan. Untuk itu,

kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan. Selain itu, dalam rangka mendukung capaian IKU 5.2, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan melakukan monitoring atas jam pelatihan bagi setiap pemeriksa. Realisasi perkembangan capaian IKU 5.2 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 - Perbandingan Capaian IKU 5.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capa	ian IKU Ta	hun
	2015	2015	2015	2014	2013
5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	90%	51,52%	57,24%	98,15%	105%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 – Perbandingan Realisasi IKU 5.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU		Та	rget Tal	Realisasi	Persentase Realisasi 2015		
IKO	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	dibanding Target 2015
5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	70%	75%	80%	90%	90%	51,52%	57,24%

#### SS 6 - Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders

Komunikasi dengan *stakeholders* dilakukan dalam rangkaian pengenalan ke-BPK-an kepada para pemangku kepentingan. Pada umumnya, kegiatan ini dikemas dalam bentuk media *workshop*, *goes to campus/school*, konferensi pers dan kegiatan *public awareness* lainnya. SS ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak kegiatan pengenalan ke-BPK-an yang telah diselenggarakan oleh Perwakilan sehingga para pemangku kepentingan lebih mengenal tugas, fungsi serta peran BPK sebagai satu-satunya eksternal kontrol atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Secara keseluruhan, skor SS 6 pada tahun 2015 adalah sebesar 105.



Gambar 12 - BPK Goes To School di SMA Labschool Unsyiah, Banda Aceh

#### IKU 6.1- Jumlah Media Relation per Tahun

Media *relation* dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPK kepada salah satu *stakeholders* BPK, yaitu para insan media. Media merupakan sarana yang paling efektif untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama tahun 2015 adalah melaksanakan konferensi pers pada saat Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2014 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kegiatan konferensi Pers ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atas hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPRA.



Gambar 13 - Konferensi Pers atas Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Aceh TA 2014

Tahun 2015, IKU 6.1 BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperoleh skor 17,60 dari target yang ditetapkan yaitu 3 media *relation*. Target IKU 6.1 tercapai dikarenakan selain dilaksanakannya kegiatan-kegiatan *public awareness*, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga menyusun dan mengunggah siaran pers pada setiap acara penyerahan LHP di *website* perwakilan. Realisasi perkembangan capaian IKU 6.1 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capa	ian IKU T	ahun
	2015	2015	2015	2014	2013
6.1 Jumlah Media <i>Relation</i> per Tahun	3	17,60	105%	105%	100%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 32- Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Та	rget Tal		Realisasi	Persentase Realisasi	
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Realisasi Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
6.1 Jumlah Media <i>Relation</i> per Tahun	2	3	3	3	3	17,60	105%

#### SS 7 - Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan

IKU pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. IKU ini mengukur pemanfaatan aplikasi-aplikasi TIK dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BPK, baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan di sekretariat. Secara keseluruhan, skor SS 7 pada tahun 2015 adalah sebesar 100.

#### IKU 7.1- Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal

IKU 7.1 ditetapkan untuk mendukung Sasaran Strategis pemanfaatan teknologi informasi. Pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh seluruh aplikasi TIK telah dimanfaatkan secara optimal.

Realisasi IKU 7.1 – Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal untuk tahun 2015 adalah sebesar 100% dengan skor senilai 100. Nilai IKU 7.1 ini telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Daftar rincian pemanfaatan TIK di BPK Perwakilan Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Teknologi Informasi	Sub Bagian yang memanfaatkan
1.	SMP	Sub Bagian Humas dan TU Kalan
2.	SI RKSP	Sub Bagian Keuangan
3.	SISDM	Sub Bagian SDM
4.	Website Perwakilan	Sub Bagian Humas dan TU Kalan
5.	SIMAK BMN	Sub Bagian Umum dan TI
6.	SAIBA	Sub Bagian Keuangan
7.	RKA-KL	Sub Bagian Keuangan
8.	GPP	Sub Bagian SDM
9.	SIMAK	Sub Bagian Humas dan TU Kalan
10.	SAS	Sub Bagian Keuangan
11.	SIK	Sub Bagian Keuangan
12.	SIKAD	Sub Bagian Humas dan TU Kalan, Sub Bagian Hukum serta Subauditorat

Tabel 33 – Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan BPK Perwakilan Provinsi Aceh

Berikut adalah capaian IKU 7.1 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 34 – Perbandingan Capaian IKU 7.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capa	ian IKU Ta	ahun
	2015	2015	2015	2014	2013
7.1 Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal	100%	100%	100%	100%	95%

Tabel 36 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Capai	ian IKU Tah	un
	2015	Tahun 2015	2015	2014	2013
8.1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	90%	94,31%	104,79%	100,27%	105%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 37– Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

	Target Tahun				Realisasi	Persentase Realisasi	
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
8.1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	90%	80%	85%	90%	90%	94,31%	104,79%

#### SS 9 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui Sasaran Strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara keseluruhan, skor SS 9 pada tahun 2015 adalah sebesar 105.

#### IKU 9.1- Tingkat Pemanfaatan Anggaran

IKU 9.1 bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara, termasuk kegiatan-kegiatan di sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan tersebut.

Pada tahun 2015, realisasi IKU 9.1 mencapai 98,24% dari target sebesar 90%, sehingga skor IKU 9.1 untuk tahun 2015 adalah sebesar 105. Adapun tren pemanfaatan anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Aceh selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:



Grafik 4 - Tingkat Pemanfaatan Anggaran (2011-2015)

Berikut adalah capaian IKU 9.1 dalam tiga tahun terakhir (2013-2015):

Tabel 38 – Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun	Realisasi Tahun	Ca	paian IKU 1	Tahun
	2015	2015	2015	2014	2013
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran	90%	98,24%	105%	101,49%	102,51%

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 39- Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

		Tar	get Tahu	ın		Realisasi	Persentase Realisasi
IKU	2011	2012	2013	2014	2015	Tahun 2015	2015 dibanding Target 2015
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran	90%	90%	85%	90%	90%	98,24%	105%

## 4. PENUTUP

Laporan Akuntabilias Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2015 berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) tahun 2015. LAK ini merupakan pertanggungjawaban kinerja yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh atas seluruh sasaran strategis tahun 2015 mencapai skor 93,05 dari skor maksimal sebesar 105. Ketidaktercapaian ini merupakan implikasi dari beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu IKU 1.1 Rekomendasi yang ditindaklanjuti, IKU 2.6 Presentase pemeriksaan yang memanfatkan portal e-Audit, dan IKU 5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan. Namun demikian, capaian target IKU selama tahun 2011-2015 menunjukkan kecenderungan meningkat.

Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yaitu :

- Secara keseluruhan, seluruh entitas di Aceh telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Namun, rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagian besar dalam status II (dalam proses) sehingga tidak dapat diperhitungkan ke dalam capaian IKU 1.1;
- Sebagian besar jenis pemeriksaan yang dilakukan pada Triwulan IV adalah pemeriksaan kinerja. Oleh karena itu, data yang ada di e-Audit tidak berkaitan langsung dengan pemeriksaan; dan
- Keterbatasan jumlah pemeriksa di perwakilan menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.